



Implementasi Investasi Sosial Sektor Industri Pertambangan

Implementation of Social Investment in the Mining Industry Sector

^{1)*} Masjon Parhusip, ²⁾ Eddy Winarno, ³⁾ Edy Nursanto

^{1,2,3} Program Magister Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta.

*Email: ¹⁾ masjon.parhusip@gmail.com, ²⁾ edynursanto@upnyk.ac.id, ³⁾ Author@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Masjon Parhusip

DOI:

10.36418/comserva.v2i6.354

Histori Artikel:

Diajukan : 29-09-2022

Diterima : 02-10-2022

Diterbitkan : 04-10-2022

ABSTRAK

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang meliputi menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak Lokasi PT Freeport Indonesia beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, manfaat tersebut diwujudkan dengan berbagai kegiatan investasi sosial yang di jalankan bersama para mitra. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum terhadap komitmen PT Freeport Indonesia dalam implementasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif secara umum memdeskripsikan suatu penelitian menjadi lebih sederhana dan bersifat subjektif. Pengolahan data dilakukan dengan studi literatur menggunakan data laporan tahunan investasi sosial PT Freeport Indonesia. Hasil pada penelitian ini memberikan gambaran secara umum terhadap komitmen PT Freeport Indonesia dalam implementasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di area operasi.

Kata kunci: Investasi Sosial; implementasi; industri pertambangan

ABSTRACT

PT Freeport Indonesia is a mining company which includes mining, processing and exploration of ore containing copper, gold and silver. PT Freeport Indonesia operates in the highlands of Mimika Regency, Papua Province, Indonesia. PT Freeport Indonesia is committed to providing benefits to the community around the operational area, these benefits are realized through various social investment activities carried out with partners. This study aims to provide an overview of PT Freeport Indonesia's commitment in implementing community development and empowerment that has been going on for the last three years. The research method is carried out using qualitative methods in general, describing a research to be simpler and subjective. Data processing was carried out by studying literature using data from the social investment annual report of PT Freeport Indonesia. The results of this study provide a general description of PT Freeport Indonesia's commitment to implementing community development and empowerment in the operational area.

Keywords: Social Investment; implementation; mining industry

PENDAHULUAN

Industri pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada dekade ini. keberadaan suatu industri pertambangan dalam suatu wilayah sudah pasti akan memberikan

dampak terhadap perkembangan wilayah dan juga akan memberi peluang sekaligus upaya dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta kesempatan berusaha masyarakat ([DWIJAYA et al.](#), 2021). Keberadaan suatu perusahaan di tengah masyarakat berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan dari masyarakat ([Kolopaking et al.](#), 2021). Dalam industri pertambangan tantangan utama di negara berkembang termasuk kurangnya regulasi mengenai desain program Pengembangan masyarakat atau agenda nasional untuk mendukungnya. Hal ini memberikan keleluasaan besar bagi industri untuk merancang program yang menguntungkan perusahaan daripada kepentingan lokal. Pemangku kepentingan juga memiliki harapan bahwa program pengembangan masyarakat diterjemahkan langsung ke dalam pengembangan proyek nyata, dan masyarakat menjadi kecewa ketika proyek tidak terwujud atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan ([Damanik et al.](#), 2022).

METODE

Mengingat kurangnya penelitian empiris dan kebutuhan untuk memahami konteks spesifik, penulis menggunakan metode kualitatif eksplorasi untuk mengumpulkan data. Untuk dapat menyelidiki motif dan hasil apa yang sebenarnya mendukung perusahaan pertambangan keterlibatan dalam CSR di negara yang secara kelembagaan lemah, strategi penelitian studi kasus adalah digunakan mengandalkan desain kasus tunggal.

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Kegiatan pembangunan tidak terlepas dan dipisahkan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dalam rangka menunjang pembangunan diperlukan eksploitasi terhadap sumber daya alam antara lain eksploitasi sumber daya mineral yaitu pertambangan. Umumnya, Kegiatan usaha pertambangan terdapat di daerah terpencil minim infrastruktur sehingga hadirnya kegiatan usaha pertambangan diharapkan dapat memicu perkembangan ekonomi wilayah sekitar pertambangan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin ([Saputra et al.](#), 2018), untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat ([Kato et al.](#), 2021). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

CSR adalah keterlibatan perusahaan dalam tindakan yang memenuhi tanggung jawab mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan ([Dhamayanti](#), 2021). Hal ini dari perusahaan yang memenuhi "ekspektasi ekonomi, hukum, etika dan kebijaksanaan (filantropi) terhadap pemangku kepentingan masyarakat".

Dari perspektif pemerintah di negara-negara yang secara institusional lemah, keterlibatan tingkat perusahaan dalam CSR (khususnya dalam penyediaan barang publik), sangat sedikit ([Idemudia](#), 2022). Perusahaan memberikan sesuatu yang dihargai oleh aktor pemerintah sebagai imbalan untuk mendapatkan kebijakan/regulasi yang menguntungkan dan menggunakan CSR untuk mendapatkan keuntungan sehingga menggunakan CSR untuk memfasilitasi strategi ketika beroperasi di negara-negara yang secara institusional lemah.

Penelitian bertujuan untuk memberikan data empiris untuk mendukung argumen terbaru dalam penelitian tanggung jawab perusahaan bahwa CSR tidak sepenuhnya altruistik ([Tamara et al.](#),

2021) tetapi sebenarnya dapat memfasilitasi CSR di tingkat perusahaan, memberikan jalur alternatif untuk keberlanjutan ekonomi perusahaan. berfokus pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan non-pasar, dapat didukung secara positif oleh kegiatan CSR perusahaan (Tamara et al., 2021).

CSR juga efektif dalam membangun dan melindungi modal reputasi (Afifah et al., 2021), sehingga meningkatkan visibilitas perusahaan mereka (Lim & Young, 2021). Secara kolektif kedua aspek ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan CSR sebagai mekanisme untuk meningkatkan hubungan pemangku kepentingan (Lim & Young, 2021), dan untuk mengembangkan ikatan politik yang lebih erat dengan pemangku kepentingan pemerintah.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945, tentang pengelolaan perekonomian pada Pasal 33 ayat 2 & 3, yaitu : (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1824 K/30/MEM/2018 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Blue print pemerintah daerah setempat

Menurut laporan Bruntland dalam WCED (*World Commision on Environment and Development*) dalam sidang tahun 1987 mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

3. Pengembangan Masyarakat lokal menjadi Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pengembangan masyarakat (*community development*) diartikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Hakekatnya pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat, dan daerah terhadap kehidupan komunitas-komunitas lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Studi Kasus Investasi Sosial PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia (PTFI) Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang meliputi menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung

tembaga, emas dan perak. Lokasi PTFI beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Pemasaran utama PT Freeport Indonesia adalah konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

PTFI berkomitmen untuk memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Manfaat tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan investasi sosial yang jalankan bersama para mitra. Investasi sosial ini merupakan komitmen berkelanjutan agar kegiatan operasi dapat berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat di sekitar area operasi. Berikut merupakan impelentasi investasi sosial yang dilaksanakan PT Freeport Indonesia :

1. Pengembangan Kesehatan

1) Tahun 2017

a. Pelayanan Rumah Sakit dan Klinik

PTFI bersinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan klinik, salah satunya melalui penyediaan tenaga kesehatan dan obat - obatan dari pemerintah. Sebagai bagian dari usaha mencapai keberlanjutan, fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut saat ini sedang diselaraskan dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah

b. Pengendalian Malaria

Menjalankan berbagai program pengendalian malaria yang meliputi konseling dan penyuluhan malaria, penyemprotan, pembagian kelambu, kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan, pendeteksian kasus malaria dan promosi anti malaria. Sebagai salah satu dampaknya, jumlah insiden malaria yang dideteksi dan diobati melalui klinik yang PTFI kelola menurun 27 persen menjadi 6.600 kasus.

c. Klinik Terapung dan Dokter Terbang

Melalui kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Mimika, pada tahun 2017, klinik terapung memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 19.000 orang di empat distrik Kabupaten Mimika dimana sekitar 7.300 diantaranya mendapatkan pemeriksaan malaria.

2) Tahun 2018

a. Kemitraan Dalam Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

PTFI membangun dan mengoperasikan beberapa fasilitas kesehatan yang meliputi klinik kesehatan di SP 9, SP 12, Pomako, Nayaro dan klinik khusus Tuberculosis (TB) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). RSMM melakukan pengembangan beberapa sarana dan prasarana rumah sakit termasuk klinik pratama. Klinik pratama ini akan menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program jaminan kesehatan (BPJS) dari Pemerintah.

b. Kemitraan Dalam Pengendalian Malaria.

Fasilitas ini melakukan berbagai kegiatan yang meliputi konseling dan penyuluhan malaria, penyemprotan, pembagian kelambu, kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan, pendeteksian kasus malaria dan promosi anti malaria.

c. Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak

Klinik bergerak menjadi salah satu kontribusi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan mendapatkan kesehatan yang layak. Pada tahun 2018, klinik bergerak memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 3.645 orang di wilayah pesisir di empat distrik Kabupaten Mimika.

3) Tahun 2019

a. Kemitraan Dalam Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

PTFI membangun dan mengoperasikan beberapa fasilitas kesehatan yang meliputi klinik kesehatan di Kampung Wangirja (SP 9), Utikini Baru (SP 12), Pomako, Nayaro dan klinik khusus Tuberculosis (TB) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Langkah-langkah strategis terus dilakukan bersama dengan pemerintah dalam penyelarasan program ini, termasuk pengembangan infrastruktur maupun administrasi bagi masyarakat.

b. Kemitraan Dalam Pengendalian Malaria.

PTFI bersama para pemangku kepentingan melaksanakan berbagai program pengendalian malaria melalui Pusat Pengendalian Malaria Timika. Fasilitas ini melakukan berbagai kegiatan yang meliputi konseling dan penyuluhan malaria, penyemprotan, pembagian kelambu, sanitasi lingkungan, pendeteksian kasus malaria dan promosi anti malaria.

c. Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak.

Bergerak memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 3.600 orang di wilayah pesisir di empat distrik Kabupaten Mimika. PTFI juga melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan di dataran tinggi.

2. Pengembangan Pendidikan

1) Tahun 2017

a. Beasiswa

Pada tahun 2017, program beasiswa diberikan kepada 611 siswa yang terdiri dari 325 (53 persen) Suku Amungme, 148 (24 persen) Suku Kamoro dan 138 (23 persen) dari suku-suku lain di Papua.

b. Asrama LPMK

Melalui Dana Kemitraan, LPMK membangun dan mengelola lima asrama bagi siswa asal Papua. Empat asrama beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan satu asrama berada di Jawa untuk para siswa yang menempuh pendidikan di Semarang. Kelima asrama tersebut memberi manfaat bagi 843 siswa pada tahun 2017.

c. Asrama Tomawin dan Institut Pertambangan Nemangkawi

Pada tahun 2017, Asrama Tomawin mendampingi 60 siswa asal Suku Amungme dalam menempuh pendidikan. Hingga tahun 2017, 2.929 siswa diterima sebagai tenaga kerja PTFI atau perusahaan kontraktor. Pada tahun 2017, sebanyak 125 siswa masih menempuh pendidikan di IPN.

2) Tahun 2018

a. Beasiswa.

Pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 591 siswa mendapatkan beasiswa berasal dari Suku Amungme (54 persen), Suku Kamoro (24 persen), dan beberapa suku-suku lain di Papua (22 persen). Pada tahun ini, LPMK memberikan beasiswa baru bagi 364 anak-anak Papua yang lolos proses seleksi.

b. Asrama Pendidikan.

Melalui Dana Kemitraan, LPMK membangun dan mengelola lima asrama bagi siswa asal Papua. Empat asrama beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan satu asrama berada di Semarang, Jawa Tengah. Kelima asrama tersebut memberi manfaat bagi 863 siswa pada akhir tahun 2018. Pada tahun 2018, Asrama Tomawin menampung 60 siswa asal Suku Amungme untuk menempuh pendidikan. .

c. Institut Pertambangan Nemangkawi

Hingga tahun 2018, sebanyak 2.982 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI atau perusahaan kontraktor. Pada tahun 2018, sebanyak 86 siswa masih menempuh pendidikan di IPN. IPN juga menyelenggarakan Program Pendidikan Orang Dewasa dan Papan Bridge Program.

3) Tahun 2019

a. Beasiswa.

Pada akhir tahun 2019, tercatat sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMK. Mereka berasal dari Suku Amungme (46 persen), Suku Kamoro (26 persen), dan suku-suku lain di Papua (28 persen).

b. Asrama dan Sekolah

Program asrama yang dijalankan oleh LPMK melalui Dana Kemitraan dari PTFI telah menjadi program unggulan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil di Kabupaten Mimika. Empat asrama beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan satu asrama berada di Semarang, Jawa Tengah. Kelima asrama tersebut memberi manfaat bagi 1.051 siswa pada akhir tahun 2019.

c. Institut Pertambangan Nemangkawi.

Hingga tahun 2019, sebanyak 2.786 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI maupun perusahaan kontraktor. IPN juga menyelenggarakan Papan Bridge Program (PBP). Hingga tahun 2019, PBP telah melatih 203 generasi muda Papua (67 persen perempuan) dengan berbagai pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam dunia kerja.

3. Pengembangan Ekonomi

1) Tahun 2017

a. Peternakan Ayam

Produksi dari program peternakan ini dapat memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan ayam dan sekitar 40 persen kebutuhan telur bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Program peternakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Melalui program ini, peternak lokal dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi ini secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Perikanan dan Budidaya Kepiting Bakau

PTFI bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika dalam penyediaan bibit ikan dan pendampingan peternak ikan. Pada tahun 2017, program perikanan keramba apung telah melakukan panen perdana sebanyak dua kali. Survei potensi perikanan air tawar telah dilakukan di Kampung Nayaro, Nawaripi, dan Tanggul Barat untuk mengembangkan dan memberdayakan lebih banyak masyarakat.

c. Pertanian.

PTFI bersama masyarakat di dataran tinggi merintis program budidaya jamur tiram sejak tahun 2016. Pada tahun 2017, PTFI melanjutkan pengembangan program ini dan mulai memasarkan hasil panen jamur sebanyak 793 kilogram.

d. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dana Bergulir.

Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2017, program UMKM memberikan pendampingan bagi 118 pengusaha di mana 86 persen diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua.

2) Tahun 2018

a. Peternakan

Program peternakan ini menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Sebagai salah satu program ekonomi unggulan, program ini memberdayakan 439 orang sebagai peternak dan karyawan dimana sebanyak 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Melalui program ini, peternak lokal dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan.

b. Pertanian

PTFI mendampingi masyarakat dalam pengembangan potensi perkebunan kopi dan sayuran. Program ini melibatkan 42 petani asli Papua yang mengelola 27 hektar lahan.

c. Perikanan

PTFI bekerjasama dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) Keuskupan Timika dalam mendampingi masyarakat dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar. Para nelayan mendapatkan bantuan untuk penyimpanan hasil tangkapan melalui empat pos

pengumpulan ikan di wilayah pesisir dan fasilitas pabrik es mini. Mereka juga dibantu dalam memasarkan hasil tangkapan mereka melalui koperasi.

4. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dana Bergulir.

Program UMKM memberikan pendampingan bagi 179 pengusaha asli Papua. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 1.000 orang Kota Timika di mana 62% merupakan tenaga kerja asli Papua. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 199,5 miliar.

1) Tahun 2019

a. Peternakan

Program peternakan ini menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan 437 masyarakat lokal sebagai peternak dan karyawan dimana sebanyak 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Para peternak lokal dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan.

b. Budidaya Pertanian

PTFI mendampingi masyarakat dalam pengembangan potensi budidaya kopi dan sayuran. Budidaya kopi ini dikembangkan di beberapa kebun di Distrik Tembagapura dan Hoesa di dataran tinggi sekitar wilayah operasi perusahaan. Program ini melibatkan 158 petani asli Papua yang mengelola 35 hektar lahan pada tahun 2019.

c. Perikanan

Pada tahun 2019, sebanyak 17,6 ton ikan hasil tangkapan nelayan Suku Kamoro dipasarkan melalui pos pengumpulan ikan di Otakwa yang terletak di wilayah pesisir timur Kabupaten Mimika.

d. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dana Bergulir.

Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2019, program UMKM memberikan pendampingan kepada 182 pengusaha asli Papua, di mana 70 persen diantaranya merupakan pengusaha asli Papua asal Tujuh Suku. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi 1.477 orang di Kota Timika di mana 62 persen merupakan tenaga kerja asli Papua. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 256,4 miliar.

1) Infrastruktur Masyarakat

a. Tahun 2017

a) Proyek Infrastruktur di Dataran Tinggi

PTFI menginvestasikan sekitar US\$ 7,9 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas micro hydro Banti 176 KW, jembatan Banti dan Opitawak serta jaringan air bersih

b) Proyek Infrastruktur di Dataran Rendah.

PTFI mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi ke kontraktor lokal yang menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang, dimana lebih dari 100 orang merupakan orang asli Papua. Meskipun proyek ini telah selesai dibangun, PTFI melanjutkan pengelolaan fasilitas ini selama satu tahun dan di saat yang sama bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menunjuk pihak ketiga profesional dalam mengelola fasilitas olahraga.

b. Tahun 2018

a) Proyek Infrastruktur di Dataran Tinggi.

Pada tahun 2018, PTFI menginvestasikan sekitar US\$ 2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas micro hydro Banti 176 KW, jembatan Banti dan Opitawak serta jaringan air bersih. Pada tahun 2018, PTFI juga menyelesaikan pembangunan micro hydro kapasitas 176 KW di Banti. Proyek ini menyediakan listrik bagi masyarakat di daerah tersebut

b) Proyek Infrastruktur di Dataran Rendah.

PTFI menyelesaikan pembangunan dua instalasi pengolahan air, satu penampungan air, enam dari tujuh sumur bor, dan gedung perkantoran pendukung. Pembangunan tahap II pemipaan dan distribusi air masih berjalan. Untuk membangun fasilitas ini, PTFI bermitra dengan kontraktor lokal yang menyediakan pekerjaan kepada lebih dari 70 orang dimana 20 di antaranya adalah orang asli Papua.

c. Tahun 2019

a) Proyek Infrastruktur Dataran Tinggi

PTFI menginvestasikan sekitar US\$ 2,2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: pembangunan jembatan di Banti, instalasi air bersih, dan pengelolaan fasilitas micro hydro Banti 176 kilo watt. Beberapa program infrastruktur di dataran tinggi yang PTFI rencanakan pada tahun 2019 berjalan kurang optimal karena belum adanya izin keamanan untuk bekerja di beberapa wilayah dataran tinggi

b) Proyek Infrastruktur Dataran Rendah

PTFI bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun fasilitas distribusi air minum ke Kota Timika, daerah perkotaan yang berkembang dan berdekatan dengan wilayah operasi PTFI.

5. Hubungan Dengan Masyarakat Dan Lembaga Lokal

1) Tahun 2017

a. Mitigasi Perpanjangan Tanggul.

PTFI membangun pelabuhan kecil di Otakwa untuk mendukung layanan transportasi ini. Jika layanan kapal tidak dapat beroperasi karena alasan cuaca, masyarakat masih mendapatkan layanan melalui transportasi bis. Berbagai program ekonomi alternatif juga dilakukan bagi masyarakat.

b. Pengelolaan Pendulangan Tanpa Ijin.

PTFI menggunakan area penampungan yang telah disetujui di daerah dataran rendah dan pesisir untuk mengelola tailing dari kegiatan penambangan. Aliran sungai tailing ini menjadi area yang digunakan masyarakat untuk kegiatan pendulangan tanpa ijin. PTFI secara proaktif melakukan sosialisasi kepada para pendulang, melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan.

c. Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Lokal.

Dalam melaksanakan komitmen sosial perusahaan, PTFI perlu mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lokal agar program dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai setempat. Beberapa lembaga lokal utama yang bekerjasama dengan PTFI yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) serta sebuah Forum komunikasi tripartit antara perwakilan masyarakat Amungme, Kamoro dan PTFI yang dinamakan Forum MoU. Pada tahun 2017, Forum MoU memfasilitasi proses rekonsiliasi kepemimpinan Lemasa.

2) Tahun 2018

a. Mitigasi Dampak Pengelolaan Tailing

PTFI melanjutkan berbagai langkah mitigasi dampak sosial pengelolaan tailing. Langkah-langkah mitigasi ini lebih terintegrasi dan terkoordinasi melalui Gugus Tugas Mitigasi Dampak Sedimentasi yang terdiri dari berbagai departemen di PTFI.

PTFI menyediakan kapal bagi masyarakat di kampung-kampung pesisir yang terdampak. PTFI melanjutkan program ekonomi berbasis desa dan sejalan dengan pilar mata pencaharian masyarakat Suku Kamoro: sagu, sungai, dan sampan.

b. Pengelolaan Pendulangan Tanpa Ijin.

PTFI melakukan Pemantauan pendulang dan sosialisasi keselamatan menjadi kegiatan rutin untuk mengurangi risiko bagi pendulang dan karyawan. PTFI juga memberdayakan 30 mantan pendulang untuk bekerja sebagai penjaga keamanan di jalan sekitar sungai aliran tailing.

c. Penanganan Keluhan Masyarakat.

PTFI menerima dan menangani keluhan masyarakat melalui Sistem Manajemen Keluhan Masyarakat. PTFI mengelola 76 keluhan dari masyarakat dimana 72 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keluhan tersebut terkait tuntutan kompensasi hak ulayat, lingkungan, dan kompensasi jasa

d. Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Lokal.

PTFI perlu mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lokal agar program dapat berjalan selalu memperhatikan nilai-nilai setempat. Beberapa lembaga lokal utama yang bekerjasama dengan PTFI yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK). PTFI juga terlibat dalam sebuah Forum komunikasi tripartit antara perwakilan masyarakat Amungme, Kamoro dan PTFI yang dinamakan Forum MoU.

3) Tahun 2019

a. Mitigasi Dampak Pengelolaan Tailings.

PTFI melakukan program mitigasi fase kedua dalam pengelolaan tailings. Langkah-langkah mitigasi ini lebih terintegrasi dan terkoordinasi melalui Gugus Tugas Mitigasi Dampak Sedimentasi yang terdiri dari berbagai departemen terkait di PTFI. Dalam program transportasi ini, PTFI menyediakan kapal bagi masyarakat di kampung-kampung pesisir yang terdampak.

b. Mitigasi Pendulangan Tanpa Ijin

PTFI melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan ini pada tahun 2019. Pemantauan terhadap pendulang dan sosialisasi keselamatan menjadi kegiatan rutin untuk mengurangi risiko bagi pendulang dan karyawan. PTFI juga memberdayakan 30 mantan pendulang untuk bekerja sebagai penjaga keamanan di jalan sekitar sungai aliran tailing.

c. Penanganan Keluhan Masyarakat.

PTFI menerima dan menangani keluhan masyarakat melalui Sistem Manajemen Keluhan Masyarakat. PTFI mengelola 60 keluhan dari masyarakat dimana 59 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keluhan yang diterima terkait tuntutan kompensasi hak ulayat, lingkungan, dan kompensasi jasa.

d. Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Lokal.

Lembaga-lembaga lokal yang menjadi representasi masyarakat asli di sekitar PTFI menjadi mitra perusahaan dalam melaksanakan komitmen sosialnya agar sejalan dengan nilai-nilai budaya dan adat setempat. PTFI menjadi bagian dari sebuah forum komunikasi tripartit antara perusahaan dan perwakilan masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro yang dinamakan Forum MoU.

6. BUDAYA

1) Tahun 2017

PTFI melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya melalui kegiatan promosi budaya Suku Kamoro. PTFI melalui pameran produk seni dan tarian dan penjualan produk seni seperti ukiran dan anyaman serta tur budaya ke beberapa kampung pesisir bagi para tamu. Sebanyak 179 ukiran Kamoro pilihan yang berasal dari 135 pengukir/penganyam dari 19 kampung di empat distrik berhasil terjual. Lomba mengukir juga diadakan bagi para pemuda Kamoro sebagai bagian dari usaha pelestarian budaya. Munculnya pengukir muda Kamoro akan turut melestarikan budayanya.

2) Tahun 2018

PTFI menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kearifan lokal dan melestarikan budaya masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. PTFI melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya melalui kegiatan promosi budaya Suku Kamoro. Promosi tersebut PTFI lakukan melalui pameran produk seni dan tarian dan penjualan produk seni seperti ukiran dan anyaman serta tur budaya ke beberapa kampung pesisir bagi para tamu.

3) Tahun 2019

Mengembangkan budaya menjadi salah satu program investasi sosial PTFI yang secara khusus memberi perhatian pada pelestarian dan promosi budaya asli Amungme dan Kamoro. PTFI menyadari pentingnya budaya sebagai identitas yang harus dijaga di tengah perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini. PTFI melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya Suku Kamoro yang sudah cukup dikenal luas. Promosi tersebut PTFI lakukan melalui kerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe. Yayasan ini bergerak dalam bidang promosi budaya Kamoro. PTFI juga turut serta dalam upaya pelestarian Noken yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. PTFI melanjutkan pendampingan bagi kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Koperasi Kanguru Jaya dalam memproduksi kerajinan noken.

7. Hak Asasi Manusia

1) Tahun 2017

PTFI melakukan berbagai langkah untuk menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM serta memberikan pelatihan dan promosi penegakan HAM kepada karyawan dan masyarakat. PTFI menghormati hak setiap individu termasuk karyawan, masyarakat, mitra, dan siapapun yang mungkin terdampak dari kegiatan.

PTFI menerima 26 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal dan diskriminasi, sekitar 1.100 karyawan PTFI, 6.200 karyawan kontraktor, 4.700 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa, kontraktor lokal, dan polisi dan militer mengikuti pelatihan HAM. PTFI telah mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan HAM.

2) Tahun 2018

PTFI menerima 20 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal, diskriminasi dan intimidasi. Untuk dugaan terkait kasus rumah tangga, PTFI meneruskan kerjasama dengan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), yang merupakan lembaga lokal yang bergerak di bidang penegakan hak anak dan wanita. Sekitar 560 karyawan PTFI, 5.000 karyawan kontraktor, 2.000 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.072 anggota polisi dan militer. PTFI juga mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan HAM.

3) Tahun 2019

PTFI menerima 15 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal, diskriminasi dan intimidasi. Dua dari keluhan ini terkait dengan keamanan. Insiden itu dilaporkan ke polisi, dan empat polisi yang terlibat dipindahkan dari area tugas di PTFI. Sekitar 1.580 karyawan PTFI, 4.400 karyawan kontraktor, 890 petugas keamanan PTFI dan perusahaan kontraktor, dan 1.700 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.060 anggota polisi dan militer yang bertugas melakukan pengamanan obyek vital nasional.

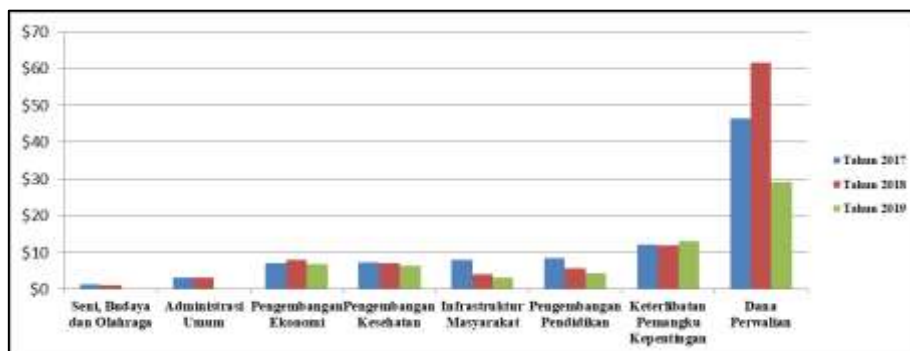
B. Anggaran Investasi Sosial PT Freeport Indonesia Tahun 2017, 2018 dan 2019

Investasi sosial yang dikelola Divisi CA dan melalui Dana Kemitraan sebesar 87 persen, sedangkan sisanya dikelola oleh divisi lain di PTFI (Institut Pertambangan Nemangkawi, Special Projects, dan Komite Kontribusi).

Pada tahun 2019, PTFI memasuki tahap peralihan dari operasi tambang terbuka Grasberg ke tambang bawah tanah. Pada masa peralihan ini, perusahaan melakukan langkah-langkah penyesuaian biaya untuk mencapai efisiensi di berbagai bidang. Namun demikian, PTFI terus menjaga komitmen untuk terus berkontribusi dalam program-program investasi sosial. Pada tahun 2019, nilai investasi sosial PTFI sebesar US\$ 62,8 juta. Di tengah perubahan operasi tambang yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, PTFI tetap berusaha mewujudkan komitmen dalam memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat sekitar.

Tabel 1. Nilai nilai investasi sosial PT Freeport Indonesia Tahun 2017, 2018, 2019

| LEMBAGA PTFI | Anggaran | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Seni, Budaya dan Olahraga | US\$ 1,2 Juta | US\$ 1 Juta | US\$ 0,2 Juta |
| Administrasi Umum | US\$ 3,2 Juta | US\$ 3,2 Juta | US\$ 0 Juta |
| Pengembangan Ekonomi | US\$ 7,0 Juta | US\$ 8 Juta | US\$ 6,7 Juta |
| Pengembangan Kesehatan | US\$ 7,3 Juta | US\$ 7,1 Juta | US\$ 6,3 Juta |
| Infrastruktur Masyarakat | US\$ 7,9 Juta | US\$ 4,1 Juta | US\$ 3,2 Juta |
| Pengembangan Pendidikan | US\$ 8,5 Juta | US\$ 5,7 Juta | US\$ 4,2 Juta |
| Keterlibatan Pemangku Kepentingan | US\$ 12,0 Juta | US\$ 11,8 Juta | US\$ 13,0 Juta |
| Dana Perwalian | US\$ 46,3 Juta | US\$ 61,6 Juta | US\$ 29,2 Juta |
| TOTAL | US\$ 93,4 Juta | US\$ 102,9 Juta | US\$ 62,8 Juta |



Gambar 2. Grafik nilai investasi sosial PT Freeport Indonesia Tahun 2017, 2018, 2019

SIMPULAN

PT Freeport Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini didukung dengan menjaga hubungan baik dan konstruktif dengan lembaga-lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi perusahaan merupakan cara PT Freeport Indonesia dalam melakukan investasi sosial. Program-program yang menjadi unggulan dalam investasi sosial PT Freeport Indonesia adalah seni, budaya dan olahraga, administrasi umum, pengembangan ekonomi, pengembangan kesehatan, infrastruktur masyarakat, pengembangan pendidikan, keterlibatan pemangku kepentingan dan dana

^{1*) Masjon Parhusip, ^{2) Eddy Winarno, ^{3) Edy Nursanto}}}
Implementasi Investasi Sosial Sektor Industri Pertambangan

perwalian. Anggaran yang telah di investasikan PT Freeport Indonesia dalam pengembangan masyarakat dari tahun 2017, 2018 dan 2019 secara berurutan adalah US\$ 93,4 Juta, US\$ 102,9 Juta dan US\$ 62,8 Juta

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Astuti, S. W. W., & Irawan, D. (2021). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(3), 346–364. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4644>
- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, S. N., Abdillah, D., Raditya, R., Salim, M. N., Hamidah, S., Rusata, T., & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.*
- Dhamayanti, S. K. (2021). Analisis implementasi tanggung jawab sosial berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, 1(2), 86–96.
- DWIJAYA, M. O. H., Misdiyanta, P., & Sari, L. P. (2021). Kajian Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kemandirian Ekonomi dan Sosial Budaya. *ReTII*, 289–294.
- Idemudia, U. (2022). Corporate Social Responsibility (Csr) And Development In Africa. *Business and Sustainable Development in Africa: Medicine or Placebo?*, 16.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., Siregar, R. T., Purba, S., Handiman, U. T., Purba, B., Firdaus, F., & Silalahi, M. (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah. Yayasan Kita Menulis.*
- Kolopaking, L., Nasdian, F. T., & Hakim, L. (2021). The Imprint and Development Of Professor Tjondronegoro Thoughts In Rural Sociology. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1). <https://doi.org/10.22500/9202135018>
- Lim, J. S., & Young, C. (2021). Effects of issue ownership, perceived fit, and authenticity in corporate social advocacy on corporate reputation. *Public Relations Review*, 47(4), 102071. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2021.102071>
- Saputra, A., Wahid, S., & Ismaniar, I. (2018). Strategi pembelajaran instruktur menurut warga belajar pada pelatihan menyulam. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(1), 9–15. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.9001>
- Tamara, I. D., Afandi, F. A., Tarigan, I. N. P., Comm, P. H. M., & Wahyuningsih Santosa, M. E. (2021). *Keberlanjutan dalam Perspektif Bisnis dan Inklusifitas. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.*



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).